

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Skripsi ini akan membahas tentang kebijakan Arab Saudi di dalam konflik Syria. Studi kasus yang akan dibahas adalah peran Arab Saudi dalam membantu pihak oposisi untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al-Assad. Pada awal tahun 2011 adanya konflik yang terjadi di Syria, konflik yang ada di Syria ini merupakan konflik internal. Awal dari konflik Syria bermula di pasar hamidiyah, Damaskus. Demo ini memang tidak mampu mengobarkan perlawanan. Tetapi dari Deraa, kota kecil yang dekat dengan perbatasan Yordania Justru memicu perlawanan yang sengit antara demonstran dan pihak keamanan. Berawal dari pelajar yang menuliskan grafiti di dinding sekolah yang bertuliskan “*As-Shaab/Yoreed/Eskaat/ el nizam*” (rakyat ingin menyingkirkan rezim).¹ Faktor yang melatar belakangi pelajar menuliskan kata yang menginginkan pemerintahan turun itu dikarenakan kekecewaan masyarakat Syria terhadap pemimpin mereka, Bashar Al-Assad.

Dari tahun 1970 hingga tahun 2000 Syria dipimpin oleh Hafez Al-Assad dan digantikan oleh penerus selanjutnya, yaitu anaknya sendiri Bashar Al-Assad. Selama Hafidz al-Assad memimpin pembangunan sosial, politik maupun ekonomi masih jauh dari kata memuaskan. Hal ini wajar saja jika terjadi demo dan rakyat menginginkan perubahan rezim. Keluarga Al-Assad telah berkuasa sangat lama dan

¹ Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah: Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi*, hal 9

bisa dikatakan adanya kejenuhan politik.

Melihat apa yang dituliskan oleh pelajar tersebut, polisi Syria oleh jendral Atef Najeeb sepupu dari Bashar Al-Assad menangkap dan memenjarakan pelajar tersebut. Mengetahui pelajar yang menjadi tahanan kepolisian mendapat siksaan, masyarakat mulai melakukan demo di kota Deraa. Penangkapan dan penyiksaan yang dilakukan pihak kepolisian Syria itu menjadi pemicu perlawanan terhadap pemerintah. Demo tersebut berawal damai, pendemo meminta membebaskan pelajar tersebut dan menuntut pemerintah untuk segera melakukan perbaikan kesejahteraan dan hak-hak politik.

Upaya dari pasukan keamanan Syria untuk membubarkan demonstrasi berujung pada konflik. Pasukan keamanan Syria melepaskan tembakan ke arah demonstran dan mengakibatkan beberapa peserta demonstran meninggal. Reaksi penembakan itu tidak sama sekali meredakan protes atas pembebasan belasan pelajar. Protes dan ketidak senangan masyarakat terhadap reaksi tersebut menyebar luas, yang berawal dari kota Deraa menuju kota-kota pinggiran *Bias, Latakia, Homs, Ar Rasta, Hama di Syria barat, serta Deir es Zor di Syria timur.*

Bentrokan antara demonstran dan pemerintahpun semakin sering terjadi. Pemerintah Syria yang tidak segan-segan menggunakan militernya untuk menghadapi para demonstran dan kerap menimbulkan korban. Aksi dari protes ini menuntut penghentian Rezim Bashar Al-assad yang dianggap otoriter, diterapkannya sistem multipartai, masyarakat Syria mendapatkan kebebasan yang lebih layak dan juga pemberhentian undang-undang darurat yang telah diterapkan sejak tahun 1963. Meski pemerintahan Bashar Al-aasad melakukan upaya-upaya reformasi tetapi hal itu dianggap terlambat. Kini rakyat Syria hanya menginginkan

penggulingan rezim Bashar Al-aasad dan melakukan pengakatan pemerintah berdasarkan sistem yang demokratis.

Seiring dengan berjalannya waktu konflik di Syiria semakin meluas. Aksi perlawanan masyarakat Syiria terhadap pemerintah pun beragam, baik secara individu maupun kelompok. Namun walaupun sering terjadinya bentrokan antara pemerintah dan masyarakat Syiria, bentrokan kerap dimenangkan oleh pasukan pemerintah Syiria. Berdasarkan hal tersebut rakyat Syiria merasa perlu untuk membentuk kekuatan oposisi yang mampu menandingi pasukan kemanan Syiria. Masyarakat yang memprotes atas kejadian pembebasan pelajar maupun atas peristiwa penembakan tersebut mulai mendirikan organisasi atau kelompok yang menjadi gerakan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Syiria.

Bentrokan bersenjata pertama kali antara pemerintah dan masyarakat oposisi terjadi pada bulan september 2011. Konflik ini tidak meredam dan terus terjadi secara berkesinambungan selama bertahun-tahun hingga sekarang. Laporan dari Pusat Penelitian Kebijakan Suriah mengatakan bahwa setidaknya 470.000 warga Suriah telah tewas akibat perang, atau hampir dua kali lipat dari jumlah 250.000 orang yang dihitung satu setengah tahun yang lalu oleh PBB, sehingga berhenti menghitung karena kurangnya data yang bisa dipercaya.²

Besarnya korban yang berjatuhan membuat dunia internasional mengecam dan mengutuk atas apa yang telah diperbuat oleh pemerintahan Bashar Al-assad. Liga Arab mengecam atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan Bashar Al-assad terhadap rakyatnya sendiri. Liga Arab meminta kepada Bashar Al-assad agar

² “ *Jumlah Korban Tewas Perang Suriah bertambah menjadi 470.000* ”, 19 Februari 2016, <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/19/jumlah-korban-tewas-perang-suriah-bertambah-menjadi-470-000/>, diakses 1 Januari 2017

segera melakukan dialog yang serius terhadap kubu oposisi. Tetapi tindakan tersebut akhirnya ditolak oleh Bashar. Pemerintahan Bashar menganggap apa yang diusulkan Liga Arab itu sebagai campur tangan yang terang-terangan terhadap masalah yang terjadi di Syiria. Liga Arab pun akhirnya mengeluarkan ultimatum bagi pemerintah Syiria, Syiria akan menerima sanksi embargo ekonomi, pembekuan aset pemerintah dan penghentian penerbangan dari negara-negara anggota Liga Arab.

Apa yang terjadi di Syiria merupakan hal yang berlawanan dengan norma dan nilai-nilai internasional. Perang saudara antara pemerintah dan pihak oposisi tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga memicu keterlibatan negara lain. Negara- negara yang terlibat dalam konflik di Syiria antara lain Rusia, AS, China, Inggris, Perancis, Israel, Turki, Arab Saudi, Qatar dan Iran. Dan negara yang mendukung atas tindakan Bashar Al-Assad adalah Rusia, China, Iran.

Ada pandangan yang mengatakan bahwa perang yang terjadi di Syiria adalah perang antara mazhab Syi'ah yang diwakili oleh Bashar Al-assad dan oposisi yang bermazhab Sunni. Pandangan ini dibangun berdasarkan fakta yang terjadi di Syiria. Ada dua kekuatan besar yang sedang bertarung atau mempunyai kepentingan di Syiria, yakni Arab Saudi yang bermazhab Sunni dan Iran yang bermazhab Syi'ah.³ Pemerintahan Bashar Al-assad didukung oleh Iran dan gerakan Hizbullah. Iran merupakan negara yang didominasi oleh masyarakat muslim yang bermazhab Syi'ah begitu juga dengan Hizbullah. Hizbullah adalah gerakan yang bermarkas di Lebanon dan telah lama mempunyai hubungan erat dengan Hafez Al-

³ “ *Kepentingan Arab Saudi Dalam Perang Suriah*”, 24 Januari 2014, <http://www.dw.com/id/kepentingan-arab-saudi-dalam-perang-suriah/a-17385172> , diakses 1 januari 2017

assad. Sebaliknya kaum oposisi didukung oleh negara-negara yang bermazhab Sunni seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Afganistan.

Arab Saudi merupakan negara yang pertama merespon atas tindakan agresif dari pemerintahan Bashar Al-Assad itu. Raja Abdullah menyatakan bahwa Bashar Al-Assad sebagai mesin pembunuh. Agresifitas politik luar negeri Arab Saudi semakin memojokan Bashar Al-asad ketika isu penggunaan senjata kimia oleh pemerintahan dan militer terkuak. Arab Saudi mengupayakan intervensi militer dengan mengajukannya ke majelis umum UN (*United Nations*), dan meminta kepada publik internasional untuk tidak mengabaikan apa yang telah diperbuat Bashar berserta pemerintahannya di Syria.

Arab Saudi tidak hanya melakukan diplomasi politik dikawasan timur tengah, tetapi juga meminta kepada Amerika Serikat untuk meyepakati perlunya intervensi militer ke Syria. Sama seperti yang terjadi di Libya, Arab Saudi memilih langkah-langkah poliktik luar negeri yang agresif dan menekan Syria semenjak perang antar saudara ini terjadi. Pilihan-pilihan politik luar negeri Arab Saudi tersebut telah memposisikan Syria sebagai ancaman. Arab Saudi merupakan negara yang mendukung pihak oposisi untuk menurunkan rezim Bashar Al-Assad serta pemerintahannya.⁴

Pernyataan resmi Raja Abdullah yang menyatakan bahwa pemerintah syiria sebagai mesin pembunuh dan meminta kepada masyarakat syiria untuk menentang atas apa yang telah dilakukan pemerintahan Bashar Al Assad terhadap demonstnan.

⁴ “ Saudi akan terus beri dukungan militer pada oposisi”, Mei 16, 2016 <http://international.sindoneews.com/read/1107835/43/saudi-akan-terus-beri-dukungan-militer-pada-oposisi-suriah-1462993337> , diaskes 1 Januari 2017

Arab Saudi bergabung dengan Liga Arab dalam mengeluarkan resolusi konflik yang diajukan ke PBB. PBB sebagai Dewan Keamanan Dunia mengecam tindakan Pemerintah Suriah dalam melakukan penyerangan terhadap pihak oposisi yang memakan banyak korban.⁵

Arab Saudi adalah salah satu pendukung terpenting bagi kalangan oposisi di Suriah. Rezim di Riyadh mengirimkan bantuan senjata dan alat-alat berat untuk kelompok oposisi. Kiriman kendaraan lapis baja dan senapan mesin secara resmi diterima oleh kelompok pemberontak Free Syrian Army (FSA). Selain bantuan senjata, Arab Saudi juga mengirim bantuan dana. Para pejuang FSA diberitakan menerima pembayaran gaji dalam mata uang dollar atau euro. Gaji tentara pemberontak lebih tinggi dari gaji rata-rata pegawai pemerintah. Dengan pembayaran itu, Arab Saudi berharap akan lebih banyak pegawai negeri Suriah yang beralih mendukung kelompok pemberontak.⁶

Konflik yang terjadi selama 6 tahun di Suriah sampai saat ini belum menemukan titik terang, negara besar seperti Rusia dan China mendukung pemerintahan Bashar dan menggunakan hak vetonya. Hal tersebut mengakibatkan resolusi yang dikeluarkan PBB tidak bisa dijalankan, namun Arab Saudi telah memperlihatkan dukungannya kepada pihak oposisi yang ada di Suriah.

⁵ “Resolusi Majelis Umum PBB kecam pemerintah Suriah”, Agustus 4 2012, Artikel diakses pada <http://www.voaindonesia.com/a/majelis-umum-pbb-kecam-pemerintah-suriah/1455054.html> , diakses 3 Januari 2017

⁶ “Kepentingan Arab Saudi Dalam Perang Suriah”, Mei 24, 2016 <http://www.dw.com/id/kepentingan-arab-saudi-dalam-perang-suriah/a-17385172> , diakses 1 Januari 2017

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas maka rumusan masalah yang ingin penulis bahas adalah “Mengapa Arab Saudi membantu pihak oposisi di dalam konflik perang saudara di Syria?”

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Sebagai dasar untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teoritis yang di dalamnya berisi teori pakar yang memiliki korelasi dan dengan objek yang diteliti serta dapat memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga di akui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis.

Teori kepentingan nasional

Dalam kepentingan nasional peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan serta yang mempunyai peran penting di dalam dunia internasional karena memberikan pengaruh terhadap masyarakat negerinya. Hal ini penting karena akan memberi manfaat bagi masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut. Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi – kondisi kemandirian ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan

masyarakat jadi terbatas.⁷ oleh sebab itu ruang gerak suatu bangsa menjadi terbatas atau terkontrol dari sebuah negara.

Adanya kepentingan nasional dikarena adanya kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi negara itu sendiri (internal). Baik dalam segi militer, politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Kepentingan juga dikaitkan dengan ‘*power*’ sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi negara lain dan mendapat pengakuan dunia. Dengan demikian secara konseptual kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara⁸

“ .. Hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki setiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai dengan kepentingan nasionalnya.. “⁹

Dengan kata lain, kebijakan luar negeri harus didasarkan pada sumber kepentingan nasional yang dianggap sangat penting. Hal tersebut didukung oleh konsep kepentingan nasional menurut **Donald E Neuchtherlin**. Neuchtherlin mempunyai padangan bahwa kepentingan nasional dapat dilihat dari hubungan yang dilakukan dengan negara lain dan menyebutkan kepentingan nasional menjadi 4 jenis, yaitu¹⁰ :

⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 89

⁸ P.Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional* Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163

⁹ Charles. P. Kindlerberger. 1993. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga, Ed.Ketujuh. Hal.21

¹⁰ Joseph Frankel 1970. *National interest : A vindication, international interest*. Hal.,69

1. Kepentingan pertahanan, kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politik dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi, kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan dengan negara lain.
3. Kepentingan Tata Internasional , kepentingan pemerintah untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya dari ancaman luar
4. Kepentingan Ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi dari negara lain.

Demikian negara yang menjadlin hubungan kerjasama tidak akan menyesal suatu nanti. Hal seperti ini dapat memperjelas tindakan langsung maupun tidak langsung yang dapat dijadikan bahan rujukan bagi pihak-pihak melakukan kerjasama. Selain itu juga bisa di jadikan sebagai bahan pembelajaran serta pengamatan terhadap kondisi internal negara yang akan menjadi partner kerjasama.

Di dalam kepentingan nasional. Hal yang membedakan secara mendasar yakni: kepentingan nasional yang bersifat vital atau ensensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau skunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan non-vital atau skunder tidak berhubungan secara langsung dengan

eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri.¹¹ Kepentingan vital menjabarkan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan. Terlebih kepada keadaan darurat suatu negara yang harus segera diputuskan. Hal tersebut berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena proses tetapi hasil dan fungsi dapat dirasakan lebih baik dalam jangka waktu panjang.

Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini adalah negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui cara paksa ataupun kerjasama.¹² tindakan ini terantung dari seberapa besar power yang dimiliki negara tersebut. Seiring dengan mememui tujuannya negara tersebut akan merubah alurnya. Yang berawal dari kepentingan awal berubah menjadi kepentingan baru.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision maker*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*foreign policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau diterapkan sebagai kepentingan Nasional.

Dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa keanekaragaman setiap negara di dunia memiliki kapasitas berbeda. Hal ini berpengaruh dari

¹¹ Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.67-69

¹² *Ibid.*, hal. 68

karakter, history, budaya, domografi yang dimiliki negara tersebut. Dapat kita lihat saat ini negara-negara melakukan kerjasama melihat kondisi dari keunggulan tiap-tiap negara yang menjadi dasar pertimbangan. Kepentingan nasional dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral tergantung pada kebutuhan.

Sesuai dengan pandangan Donal E Neucterlin kepentingan pertahanan, kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politik dari ancaman negara lain terbukti dalam bagaimana kepentingan keamanan Arab Saudi untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman teroris ISIS. Serta Arab Saudi juga mengantisipasi dalam penyebar luasan jejaringan ISIS di negara teluk.

Kemudian terkait dengan kepentingan ekonomi, Arab Saudi ingin menggulingkan Bashar Al- Assad terkait dengan jalur pipa minyak yang ingin dibangun Arab Saudi di Syiria. Karena jika Arab Saudi dapat menjatuhkan pemerintahan Bashar Al-Assad maka Arab Saudi bisa mendapatkan akses jalur pipa minyak dengan mudah untuk menekan biaya produksi dan menghemat waktu.

Ideologi merupakan pemikiran mendasar yang sebelumnya tidak ada pemikiran lain. salah satu dari karakter ideologi bisa melahirkan sistem untuk memecah belah manusia. diketahui bahwa di Syiria menganut agama islam tetapi memiliki paham yang berbeda. Yaitu pemerintah yang menganut paham Syiah Alawiyah dan oposisi menganut paham Suni. Kedua paham tersebut sudah terlihat jelas tidak didapat disatukan dan telah lama berselisih. karena perbedaan pemikiran, kehidupan sosial dan kehidupan beragama. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu konflik di Syiria. Arab Saudi merasa terancam dengan adanya ideologi islam

alternatif maka Arab Saudi merasa perlu mengambil tindakan untuk mempertahankan kepentingan ideologinya.

D. HIPOTESIS

Arab Saudi melakukan intervensi di Syria dengan mendukung pihak oposisi *FSA*, *Jaish al-Fath*, *Front Selatan* karena memiliki kepentingan sebagai berikut:

1. Kepentingan Keamanan yaitu konflik di Syria menjadi ancaman bagi Arab Saudi dan Negara-negara Timur Tengah dikarenakan lokasi strategis dari Syria.
2. Kepentingan Geo Ekonomi yaitu terkait dengan strategisnya letak Syria. Arab Saudi berencana membangun jalur pipa gas melalui Syria agar menghemat anggaran.
3. Kepentingan Ideologi yaitu adanya perbedaan mazhab yang dianut oleh Arab Saudi dan pemerintahan Syria. Arab Saudi bermazhab Sunni sedangkan pemerintahan Syria yang diwakili Bashar Al-Assad bermazhab Syia'ah Alawiyah.

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penulisan skripsi bertujuan untuk:

1. Menginformasikan dan mencari tahu tentang kepentingan Arab Saudi di Syria dalam menggulingkan pemerintahan Bashar Al Asaad
2. Pada umumnya sebagai persyaratan untuk meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Dalam tulisan ini, sesuai dengan topik yang akan dibahas, penulis akan membatasi ruang penelitian sampai dengan konflik Syria dan peran Arab Saudi dari tahun 2011 sampai sekarang. Penulis akan mengamati data dan pembatasan ruang penelitian bertujuan agar tidak ada analisa lebih lanjut.

G. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa library research dan interview dengan memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

BAB I Menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan, Dan Daftar Pustaka.

- BAB II** Menguraikan Secara detail tentang konflik di Syiria diawali dengan latar belakang konflik Syiria dilanjutkan dengan pemerintahan Bashar Al-assad yang otoriter dan juga dinamika konflik yang terjadi di Syiria.
- BAB III** Menjelaskan Tentang dukungan Arab Saudi terhadap pihak oposisi di Syiria. Dimulai dengan Hubungan Arab Saudi dengan Syiria pasca sebelum terjadinya konflik dan pasca terjadinya konflik. Diteruskan dengan bantuan yang diberikan Arab Saudi kepada pihak oposisi.
- BAB IV** Faktor yang melatar belakangi dukungan Arab Saudi terhadap pihak oposisi di Syiria dan menjelaskan kepentingan Arab Saudi dalam konflik di Syiria.
- BAB V** Kesimpulan dan saran. Akan berisi kesimpulan dari apa yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.